

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Dwi Septiyani, Yuwita Ariessa Pravasanti, Suhesti Ningsih³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

dwiseptiyani18308@gmail.com¹, yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com², hesti.hegi@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Septiyani, D., Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 464-471.

Abstract: *This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Revenues on Regional Expenditures. The type of data used in this research is secondary data in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports (APBD) obtained through the website djpk.kemenkeu.go.id. The population in this study were all regencies/cities in Central Java Province consisting of 29 regencies and 6 cities. Sampling used saturated sampling technique, in which all members of the population were sampled to obtain 175 sample data. The analytical methods used in this study were descriptive statistics and classical assumption tests which included normality tests, multicollinearity tests, autocorrelation tests, and heteroscedasticity tests. The data analysis method uses multiple linear regression analysis. The t-test results show that the significance value of Local Own Revenue is 0.000, Balancing Funds is 0.000 and Other Legal Regional Income is 0.000. The results of the t-test show a value below 0.05 for each independent variable so that Regional Original Income, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Revenues have a significant effect on Regional Expenditures.*

Keywords: *Income, Balancing Fund, and Regional Expenditure.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh melalui website djpk.kemenkeu.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh data sampel sebanyak 175. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000, Dana Perimbangan 0,000 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,000. Hasil uji t menunjukkan nilai dibawah 0,05 untuk setiap variabel independen sehingga Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah.*

1. Pendahuluan

Isu anggaran pada reformasi sistem pemerintahan Indonesia mendorong pemerintah

daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan guna menciptakan keselarasan antar daerah. Setiap wilayah diberi hak untuk



mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dan tugas pembantuan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Namun kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belum terealisasi dengan baik. Pengeluaran pemerintah didominasi untuk belanja pegawai daripada pembangunan daerah. Pemerintah terlalu banyak menggagas program tanpa hasil yang signifikan. Disamping itu ada beberapa provinsi yang membiarkan dana daerahnya mengendap di bank, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan masih diperlukannya evaluasi dan perbaikan dari perencanaan anggaran.

Liesionis (2013), menyatakan bahwa inefisien dan dislokasi anggaran akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Maka pemerintah perlu mengubah kebijakan strategi anggaran. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja daerah untuk dapat segera mengatasi permasalahan dalam alokasi belanja daerah.

Banyak faktor yang mempengaruhi belanja daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Namun beberapa tahun belakangan ini PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar Rp 1,9 triliun atau sekitar 12,5% akibat pandemi Covid-19. Maka pemerintah harus lebih menggali potensi daerah guna mendorong peningkatan PAD. Budiarto dan Alexander (2016), berpendapat mengembangkan sumber-sumber penghasil PAD dapat menaikkan penerimaan yang berakibat pada meningkatnya pengalokasian belanja daerah. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Wati dan Fajar (2017) dan Panjaitan (2021) bahwa PAD memiliki dampak positif pada belanja daerah. Di sisi lain, Amalia et al (2015), menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh pada belanja daerah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

Rendahnya PAD yang hampir terjadi di setiap wilayah otonom, membuat daerah memerlukan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana

Perimbangan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam belanja daerah. Aziz (2016), menyatakan bahwa semakin banyak dana perimbangan yang diterima suatu wilayah maka semakin banyak ketersediaan dana untuk mendanai administrasi pemerintahan dan melayani masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Andrasari et al (2016), Wati dan Fajar (2017), hasil penelitiannya disebutkan jika dana perimbangan berdampak positif terhadap belanja daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Meskipun jumlahnya yang tidak begitu besar, lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menambah jumlah anggaran belanja daerah. Andrasari et al (2016), serta Panjaitan (2021) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif pada belanja daerah. Namun, pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian dari Nurdiwati et al (2017), bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah kurang berkontribusi pada belanja daerah dikarenakan jumlahnya yang terlalu kecil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah di provinsi Jawa Tengah.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening anggaran umum daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan (UU No. 12 tahun 2019). Secara garis besar belanja daerah terbagi atas 2 kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung terkait pelaksanaan program/kegiatan yaitu meliputi biaya pegawai, belanja barang dan



jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah pengeluaran anggaran secara tidak langsung terkait pelaksanaan program/kegiatan diantaranya yaitu bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (UU No. 12 Tahun 2019). Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Keberhasilan kemandirian daerah diukur dari persentase Pendapatan Asli Daerah dalam anggaran pengeluaran. Maka dari itu pemda dituntut untuk terus mengembangkan potensi daerah guna mendorong kenaikan PAD. Menurut Adriani & Yasa (2015), kenaikan pendapatan asli daerah akan membuat longgar anggaran belanja daerah sehingga pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat akan semakin banyak.

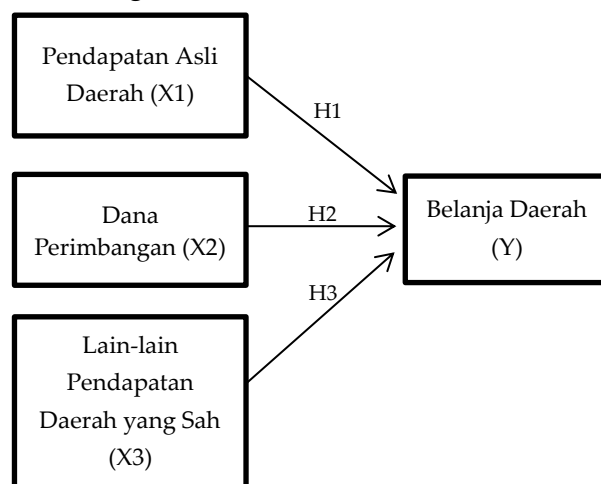
2.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada wilayah otonom untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan tersusun atas beberapa komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Melalui dana perimbangan, diharapkan mampu mendorong kontribusi publik terhadap pembangunan, memperbaiki kualitas ekonomi yang akan memicu potensi kenaikan pendapatan setiap daerah sehingga pada periode mendatang dapat mengurangi besaran dana transfer. Penelitian Priatna dan Purwadinata (2019), menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dana transfer memiliki pengaruh positif pada belanja daerah yang berarti setiap terjadi peningkatan jumlah dana transfer akan diikuti kenaikan anggaran belanja daerah.

2.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan selain PAD dan dana transfer, yaitu meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya (UU No. 23 Tahun 2014). Penerimaan ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dana tambahan yang dapat menambah jumlah anggaran dalam belanja. Andrasari et al (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki dampak positif pada belanja daerah. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Asari dan Suardana (2018), Setiawan dan Andaris (2019), Panjaitan (2021) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh pada belanja daerah.

2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
- H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- H3: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif yang difokuskan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 175 yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah d tahun 2016-2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah metodologi pengambilan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2018). Sehingga diperoleh sampel sebanyak 175 data. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah metodologi memperoleh data melalui buku, dokumen, dan laporan (Sugiono, 2018). Metode analisis data menggunakan deskriptif dan regresi linier berganda.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PAD	175	17127752	2066333418	3845340485	2713870276
DP	175	52204258	1941145933	1291523883	3381668627
LLPDS	175	5441	885	860,49	82,947
BD	175	52090070	9743291160	4745670866	1964891680
Valid N (listwise)	175	278	36	10,07	98,918
		79835319	4633934340	2158426653	6718065699
		1714	973	153,58	78,596

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel pada hasil statistik deskriptif data penelitian, jumlah populasi adalah 175. Variabel PAD memiliki nilai min. 171.277.522.706, nilai maks. 2.066.333.418.588, mean 384.534.048.578,30 dan standar deviasi 271.387.027.603,818. Variable Dana Perimbangan memiliki nilai min. 522.042.585.441, nilai maks. 1.941.145.933.885, mean 1.291.523.883.860,49 dan standar deviasi 338.166.862.782,947. Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai min. 52.090.070.278, nilai maks. 974.329.116.036, mean 474.567.086.610,07 dan standar deviasi sebesar 196.489.168.098,918.

a. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		175
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^a	Std.	269238777443,9849200
^b	Deviation	0
Most	Absolute	0,204
Extreme	Positive	0,204
Differences	Negative	-0,153
Test Statistic		0,204
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas dengan *One Sampel Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai 0,204 dengan tingkat sign. 0,200. Dengan sign. 0,200 ($> 0,05$), maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikoloneliritas

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	0,804	1,243
DP	0,397	2,518
LLPDS	0,364	2,749

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai toleransi dari setiap variabel lebih dari 0,10 dan VIF dari setiap variabel kurang dari 10. Maka data tidak terdapat multikoloneliritas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

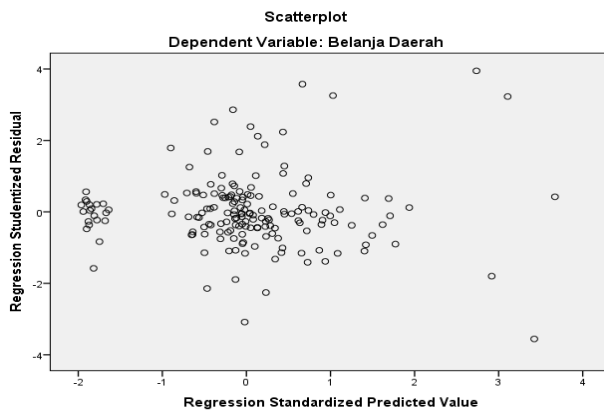
		Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
R	Adjusted R Square		n
0,989	0,979	97997563439,012	1,805

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson (1,805) dengan jumlah observasi (n)=175, variabel bebas (k)=3, dan tingkat signifikansi (α)=0,05 sehingga didapatkan nilai $dl=1,7180$ dan $du=1,7877$. Nilai du 1,7180 $<$ nilai DW 1,805 $<$ 2,2123 ($4 - dU = 4 - 1,7180$). Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.



Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas, tidak menunjukan pola yang jelas atau titik-titik terdistribusi dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas

b. Pengujian Hipotesis

1) Analisis Linier Berganda

Table 5. Hasil Analisi Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
Constant	-1442608,9651285		-0,478	0,633
PAD	1,019	0,031	33,397	0,000
DP	1,051	0,035	30,146	0,000
LLPDS	0,893	0,063	14,243	0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DP} + \beta_3 \text{LLPDS} + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = -14426089651,285 + 1,019 \text{PAD} + 1,051 \text{DP} + 0893 \text{LLPDS} (2)$$

Nilai konstanta sebesar -14426089651,285 artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (X1) = 0, Dana Perimbangan (X2) = 0, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3)=0, maka Belanja Daerah (Y) menurun sebesar 14426089651,285. Koefisien

regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,019, artinya peningkatan PAD 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar 101,9% jika konstanta variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien regresi Dana Perimbangan (DP) sebesar 1,051, artinya, peningkatan DP 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar 105,1% jika konstanta variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien regresi lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDS) sebesar 0,893, artinya, peningkatan LLPDS sebesar 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar 89,3% jika konstanta variabel independen lainnya adalah tetap.

1) Uji F (Uji Kelayakan Model)

Tabel 6. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7688818540,191751000000000000000000	3	256293951,339725030000000000000000	2668,749	0,000
Residual	1642202337,237121200000000000000000	171	960352243,998316400000000000000000		
Total	7853038773,915463000000000000000000	174			

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel diatas menunjukan nilai Fhitung (2668,749) > Ftabel (2,67) yang artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan nilai sign. 0,000 < 0,05 yang artinya model regresi dalam penelitian ini layak digunakan.

2) Uji t

Tabel 4.6 Hasil uji t

Model	t	Sig.	Hasil Penelitian
PAD	33,397	0,000	berpengaruh
DP	30,146	0,000	berpengaruh
LLPDS	14,243	0,000	berpengaruh

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, variable pendapatan

asli daerah memiliki thitung sebesar (33,397) > ttabel (1,973934) dan sig. 0,000 < 0,05, maka secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana perimbangan memiliki thitung (30,146) > ttabel (1,973934) dan tingkat sign. 0,000 < 0,05, maka secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Variable lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki thitung (14,243) > ttabel (1,973934) dan tingkat sign. 0,000 < 0,05, maka lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.7 Hasil uji Koefisien Determinasi

R	Adjusted	Std. Error of the
R Square	R Square	Estimate
0,989	0,979	0,979
		97997563439,012

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Pada tabel diatas, nilai Adjusted R^2 (0,979), yang berarti 97,9 %, maka semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan sisanya 2,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum disebutkan dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli memiliki nilai sign. sebesar 0,000<0,05 atau nilai koefisien (1,019) dan thitung (33,397)>ttabel (1,973934). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan PAD akan menaikkan jumlah anggaran dalam belanja daerah. Maka pemerintah perlu menggali dan mengembangkan sumber daya yang berpotensi meningkatkan PAD. Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Wati dan Fajar (2017), Panjaitan (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif pada belanja daerah.

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Perimbangan memiliki tingkat sign. 0,000 < 0,05 atau nilai koefisien (1,051) dengan thitung (30,146) > ttabel (1,973934). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan bentuk usaha pemerintah pusat menciptakan keselarasan keuangan antar daerah. Semakin banyak dana perimbangan yang diterima oleh wilayah, semakin banyak dana yang tersedia untuk mendanai administrasi pemerintahan dan melayani masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Andrasari et al (2016), Wati dan Fajar (2017), yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif pada anggaran belanja.

c. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan variabel Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki tingkat sign. sebesar 0,000 < 0,05 dan thitung (14,243) > ttabel (1,973934). Maka dapat disimpulkan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan selain dari PAD dan dana transfer yaitu meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lain. Meningkatnya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berakibat pada meningkatnya anggaran belanja daerah. Hasil ini didukung penelitian dari Andrasari et al (2016), dan Panjaitan (2021) yang menyimpulkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki berdampak positif pada pembelanjaan daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah; Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dengan besaran pengaruh sebesar 97,9%.

6. Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel bebas sehingga penelitian ini tidak dapat mencakup semua variabel yang dapat mempengaruhi belanja daerah serta sampel yang digunakan hanya dalam waktu 5 tahun. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel indikator terkait belanja daerah dan menambah sampel tahun agar penelitian lebih valid dan mendapatkan hasil yang maskimal.

7. Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan di ITB AAS Indonesia. Tak lupa kedua orang tua dan saudara yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada penulisan artikel.

Daftar Pustaka

- Andrasari, Y., Nugroho, T. R., & Ainiyah, N. 2016. Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2016. 32: 1–14.
- Aziz, Asmaul. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). E-journal STIE Dewantara. 11.1: 86-101.
- Budianto dan Alexander., Stanly W. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. 4.4: 844-851.
- Ferdiand, Augusty. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Liesionis, V. 2013. The Relationship Between Government Expenditure. Journal of Security and Sustainability Issues. (www.lka.lt/index.php/lt/217049/), diakses 25 Februari 2023.
- Nurdiwaty, D. Zaman, B., & Kristinawati, E. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur. Jurnal Aplikasi Bisnis. 17.1: 43-59
- Panjaitan, R. Y. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. ejournal.lmiimedan.net. 7.1: 65-74.
- Rizqi, Wai dan nor, wahyudin. 2015. Flypaper Effect Pada Pendapatan Adli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daearah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Diprovinsi Kalimantan Selatan(2009-2013). Jurnal Akuntansi dan Bisnis. 15.1: 1-12.
- Saepul, A. H. dan E. Baharuddin. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nompr 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Wati, M. R. dan Fajar, C. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi.



1.1

- Winarno, W.W. 2017. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Wele, M. Y. E., & Mildawati, T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Bos. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1–19.
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di SMP N 3 Sukawati Dalam Program RKAS. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 139–151. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1805>

